

BAB V

KESIMPULAN

Pada dasarnya dalam tahapan mencapai integrasi Eropa seperti sekarang melalui proses yang cukup panjang dimulai dari pembentukan *European Coal and Steel Community* (ECSC), *European Economic Community* (EEC), dan *European Atomic Community* (Euratom), kemudian berkembang menjadi *European Union* (Uni Eropa). Hingga saat ini Uni Eropa terdiri dari 27 negara anggota, pasca referendum Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Sementara itu Uni Eropa tetap memberlakukan kebijakan bagi negara-negara Eropa yang ingin bergabung dalam integrasi Uni Eropa.

Perjanjian Uni Eropa menyatakan bahwa setiap negara Eropa dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa apabila secara politik, ekonomi, dan hukum memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Uni Eropa. Hingga saat ini ada lima negara yang memiliki status ‘negara calon anggota’ diantaranya adalah Islandia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, Montenegro, Serbia, dan Turki.

Pada 3 Oktober 2005, Uni Eropa dan Turki memulai negosiasi aksesi. Hal itu merupakan hasil dari *Brussel Summit* 2004 yang memutuskan bahwa Uni Eropa akan memulai negosiasi dengan Turki. Untuk dapat mencapai keanggotaan penuh, Turki harus memenuhi 35 bab negosiasi yang harus disepakati oleh semua negara anggota Uni Eropa. Hingga saat ini Turki telah menyelesaikan 16 bab negosiasi di mana satu bab dari 16 bab negosiasi ditutup untuk sementara waktu.

Kemampuan Turki dalam memenuhi prasyarat yang diberikan oleh Uni Eropa mendapat apresiasi dari beberapa negara-negara anggota Uni Eropa. Beberapa negara menyampaikan dukungannya kepada Turki agar dapat bergabung di Uni Eropa, antara lain: Portugal, Italia, Swedia, Republik Ceko, Spanyol, dan Inggris.

Menteri Luar Negeri Luxembourg dan Urusan Eropa Jean Asselborn menegaskan bahwa Turki sebagai mitra penting bagi Uni Eropa dalam menjaga stabilitas dan keamanan benua Eropa, sangat disayangkan apabila tidak ada pertemuan tingkat tinggi secara teratur dengan Turki. Hal itu disampaikan oleh Jean Asselborn dalam *EU-Turkey Summit* pada 29 November 2015.

Namun, dengan proses negosiasi keanggotaan Turki yang berjalan hingga sebelas tahun inilah, yang dianggap tidak wajar. Hal ini dikarenakan Kroasia yang juga memulai negosiasi aksesinya pada tahun 2005 sama dengan Turki bahkan telah secara resmi memperoleh keanggotaan penuh pada 1 Juli 2013. Sementara itu, hingga tahun 2016 Turki masih berupaya memenuhi prasyarat menjadi anggota Uni Eropa.

Meskipun berdasarkan survei yang dilakukan oleh Eurobarometer menyatakan bahwa dukungan keanggotaan Turki masih dominan. Tetapi dukungan keanggotaan Turki telah menurun 4% sejak 2010, sisanya 42% responden masih menganggap bahwa keanggotaan negara mereka akan menjadi hal yang baik.

Sementara itu dalam skripsi ini menunjukkan pencapaian proses integrasi Uni Eropa menurut prinsip intergovernmentalism. Lembaga-lembaga Uni Eropa yang menjalankan intergovernmental adalah *The European Council* (Dewan Eropa) dan *The Council of European Union* atau *Council of Ministers* (Dewan Menteri-menteri). Sehingga keputusan Uni Eropa terkait permohonan keanggotaan Turki berdasarkan hasil tawar-menawar dan negosiasi strategis antarnegara, di mana negara-negara anggota yang lebih besar dengan kemampuan yang lebih besar secara struktural seperti (ekonomi, penduduk, militer dan geografi) akan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kekuasaan politik.

Faktor Uni Eropa belum menerima permohonan keanggotaan Turki dari tahun 2005 hingga 2016 adalah yang pertama, karena di dalam Uni Eropa ada beberapa negara anggota yang mendukung keanggotaan Turki. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada empat negara anggota Uni Eropa yang menentang keanggotaan Turki. Negara-negara penentang keanggotaan Turki di Uni Eropa antara lain Prancis, Jerman, Siprus, dan Austria.

Masing-masing preferensi negara penentang keanggotaan Turki, pada dasarnya memiliki kepentingan dari proses akses Turki. Seperti Siprus yang menuntut Turki untuk terlebih dahulu mengakui kedaulatan Siprus. Sampai saat ini, Turki tidak mengakui pemerintahan Siprus. Sebaliknya, Siprus yang merupakan negara anggota Uni Eropa memblokir delapan bab penting terkait negosiasi Turki menjadi anggota Uni Eropa.

Sementara itu Austria berdasarkan survei opini publik Austria ada sekita 81 persen yang menyatakan penolakannya terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa. Namun, di antara empat preferensi negara-negara penentang tersebut ada dua negara yang secara struktural memiliki ‘kekuatan’ lebih akan memiliki lebih banyak kepentingan yang dapat terpenuhi.

Faktor kedua Uni Eropa belum menerima keanggotaan Turki dari tahun 2005 hingga 2016 karena preferensi kedua negara (Prancis dan Jerman) yang pada akhirnya mendominasi keputusan Uni Eropa terkait proses keanggotaan Turki. Secara perwakilan di dalam institusi Uni Eropa baik Prancis dan Jerman memiliki jumlah perwakilan yang tinggi daripada negara-negara dengan penduduk sedikit. Representasi dalam pembuatan keputusan tentu preferensi Prancis dan Jerman akan lebih mudah terpenuhi. Kedua negara itu dapat mempengaruhi apakah bab negosiasi keanggotaan Turki dapat dibuka atau ditutup.

Hal itu sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing negara. Seperti Prancis di bawah kepemimpinan Hollande menjelaskan kepada publik Prancis mengapa sangat skeptis atas konsesi keanggotaan Turki di Uni Eropa. Ia menegaskan bahwa itu merupakan kunci untuk mengambil janji Ankara dalam menangani pengungsi agar dapat berlayar ke Eropa. Upaya memenuhi preferensi Hollande dengan cara membuka bab ke 33 yang merupakan bagian dari negosiasi keanggotaan. Di mana bab ke 33 pernah dibekukan di bawah kepemimpinan Nicolas Sarkozy.

Di sisi lain, preferensi Jerman yang disampaikan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan bahwa ia mendukung Turki untuk memperoleh “*privileged partnership*” dibandingkan dengan “*full membership*”. Alasan mendasar bahwa *statement* tersebut didukung oleh partai-partai pendukung kepemimpinannya. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak akan keanggotaan Turki di Uni Eropa salah satunya adalah perimbangan kekuatan di lembaga-lembaga Uni Eropa.

Representasi Turki di lembaga-lembaga Uni Eropa berdasarkan kesimpulan dalam *The Nice Summit*, jika Turki adalah negara anggota Uni Eropa, Turki akan diwakili dengan 74 kursi anggota di Parlemen (seperti Prancis, Inggris dan Italia) dan memiliki 29 suara di Dewan Uni Eropa (seperti Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia). Selain itu, Turki bisa mengirimkan 1.000-1.500 birokrat untuk mengisi di Komisi Eropa dan lembaga-lembaga lain di Uni Eropa. Sebagai negara dengan populasi yang besar, Turki akan memperoleh signifikansi dalam perkembangan di Uni Eropa.

Keanggotaan Turki secara signifikan di Uni Eropa juga akan mempengaruhi alokasi kursi untuk negara-negara anggota Uni Eropa saat ini. Khususnya negara-negara yang sedang dan besar harus menyerahkan kursi untuk mengakomodasi keanggotaan Turki di Uni Eropa. Hal itu menjadikan negara-negara seperti Prancis dan Jerman berupaya untuk menarik ulur keanggotaan Turki di Uni Eropa hingga negosiasi keanggotaan ini berjalan selama sebelas tahun tanpa ada batas waktu negosiasi ini akan berhenti bahkan tanpa ada penetapan waktu diterimanya Turki dalam integrasi Uni Eropa.